



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yang didalamnya tercantum VISI dan MISI Kepala Daerah Provinsi Maluku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis, sehingga pada tahun 2025 kekurangan tersebut akan diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja dengan tetap mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan tahun 2019 – 2024. Di samping keterpaduan dengan unit kerja lain, khususnya stakeholder yang menangani permasalahan Kantrantibmas dan Politik di daerah akan terus ditingkatkan sehingga kenyamanan dan kedamaian masyarakat di wilayah Provinsi Maluku dapat terwujud, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ambon, Februari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**



DANIEL EDUARD INDEY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681210 198902 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi untuk menunjang pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Maluku di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2019 – 2024 terdiri dari 6 program dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memperlancar pelaksanaan tugas rutin perkantoran, meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dan meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber Daya Aparatur Kesbangpol.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketentraman dan keamanan wilayah.
3. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif bagi kelancaran, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas.
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat mengenai Wawasan Kebangsaan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 253.396.681.699,-** dengan anggaran perubahan sebesar

Rp. 268.512.498.862,- dan Realisasinya sebesar **Rp.267.161.458.262,-** atau **99.5%**.

Penggunaan dana dari APBD diperuntukkan bagi upaya mewujudkan **Capaian Kinerja** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, yang tertuang dalam 6 (enam) program :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**
2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**
3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.**
4. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**
5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**
6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.**

Informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat melengkapi berbagai informasi yang terkait dengan tingkat capaian kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.....	4
D. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Visi Dan Misi	8
B. Tujuan Dan Sasaran	9
C. Kebijakan Dan Program	11
D. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
I. Sasaran 1	14
II. Sasaran 2	16
III. Sasaran 3	18
IV. Sasaran 4	21
V. Sasaran 5	26
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	37
Lampiran :	
1. Struktur Organisasi	
2. Data Pegawai	
3. Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah	
4. Indikator Kinerja Utama	
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan	
6. Pengukuran Pencapaian Sasaran	
7. Pohon Kinerja	
8. Sasaran Kinerja Pegawai	
9. Rencana Aksi	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan yang didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perubahan kondisi global dan demokratisasi serta tuntutan masyarakat agar suatu Instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Penerapan manajemen pemerintah yang berorientasi pada hasil ini mengharuskan setiap Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu mendefinisikan ukuran kinerjanya secara spesifik. Ukuran kinerja ini tidak sekedar kinerja dari penggunaan anggaran semata, tetapi dapat bersinergitas dengan ukuran kinerja yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang diemban.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan salah satu bagian dari Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai salah satu fungsi untuk menunjang pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai penjabaran dari pencapaian fungsi diatas melalui penetapan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2024 yang merupakan rangkaian tahapan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku akan berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan 2019 – 2024.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan rakyat melalui UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Untuk menciptakan *Good Governance* diperlukan prinsip-prinsip : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun dan disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dalam penyusunan rencana program Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Merumuskan Program di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Rencana Strategis di Daerah / Renstra.
- b) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) Melaksanakan Pemerintahan di Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d) Menyelenggarakan Pembinaan Teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e) Membina dan mengendalikan semua kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait lainnya.
- f) Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua Satuan Kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g) Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran / rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h) Menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan layanan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i) Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karir berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- j) Menyelenggarakan tata usaha Badan.
- k) Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan.
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas lain di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- m) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- n) Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut melalui susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat Badan yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yakni :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Fungsional Perencana Ahli Muda
 - Sub Bagian Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Penanganan Konflik.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Organisasi Masyarakat.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.
- f. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

C. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya sistem politik demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif suprastruktur dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab.
2. Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis, demokratis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengamalan,

pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa, bela negara dan wawasan kebangsaan.

3. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.
4. Terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi 5 (lima) permasalahan utama untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajemen maupun kemampuan finansial membiayai aktifitasnya.
2. Jumlah kelembagaan masyarakat termasuk partai politik cukup besar dibanding dengan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembinaannya.
3. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi.
4. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu.
5. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan gambar umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan analisa per-sasaran startegis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2024 dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per-sasaran strategis Tahun 2023

Bab IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa, Tujuan Nasional adalah ***"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"***. Tujuan Nasional tersebut merupakan cita-cita yang mengekspresikan hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang perwujudannya memerlukan upaya-upaya secara terencana, sistematis, komprehensif dan terintegrasi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2007 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, juga ditegaskan bahwa untuk menjamin agar tugas-tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan pembangunan nasional, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek.

Untuk mewujudkan Agenda Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menyusun Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019 – 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Maluku, dimana tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah unsur penunjang pemerintah Provinsi Maluku secara hirarki bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Untuk mempercepat terwujudnya Visi dan Misi serta Agenda Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi dan memperkuat keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Terkait dengan itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menyusun Rencana Strategis Perubahan tahun 2019 – 2024 dengan mengacu pada Renstra Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019 – 2024.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta

isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Perencanaan strategis ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang kuat bersama untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam berbagai tingkatan pada suatu Institusi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

A. RENCANA STRATEGIS

❖ Visi

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dengan Visi yang hendak dicapai yakni :

***"Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan "***

❖ Misi

Upaya mewujudkan visi sebagaimana telah diuraikan diatas untuk periode kedepan, maka misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah :

5. Mewujudkan biokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau.
7. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
8. Peningkatan infastruktur dan konektivitas gugus pulau
9. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.
10. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

❖ Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA OPD
						2018 (realisasi)	2019 (target)	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Partai Politik	Indeks Demokrasi Provinsi Maluku	Meningkatnya Presentase Kualitas Demokrasi	Presentase Kualitas Demokrasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Presentasi Pencegahan dan Penanganan Konflik	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas	Presentase Konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	Presentase Tindak Kriminalitas yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.	Presentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Presentase Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan Kapasitas, Sumber daya aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

❖ Kebijakan Dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada Visi dan Misi, sasaran dan tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aparaturnya Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat untuk memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.
2. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB), antar golongan dan etnis untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai.
3. Menjalin kerjasama infrastuktur dan suprastruktur politik, partisipasi dan kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan dan pemuda dalam rangka turut serta membela dan mempertahankan persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
6. Menumbuhkan mekanisme kerja kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditopang oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang optimal dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis.
7. Sarana dan prasarana perkantoran untuk pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.
8. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis diatas, akan diimplementasikan melalui Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
3. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

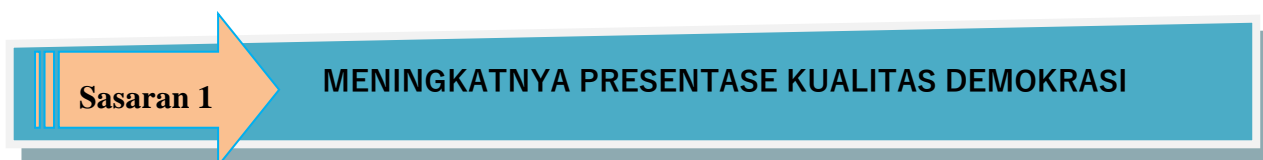
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Presentase Kualitas Demokrasi	Persentase Kualitas Demokrasi	100%
2	Meningkatnya Toleransi Beragama dan Penghargaan Masyarakat Terhadap Pluralitas	Persentase Konflik yang Tertangani	100%
3	Menurunnya Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminalitas yang Tertangani	100%
4	Meningkatnya Pemahaman akan Pentingnya Memperkuat Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	Persentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Tanah Air	100%
		Persentase Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat Beragama	100%
5	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dari dana APBD sebesar sebesar **Rp. 268.512,498,862,-** dengan perincian, dana belanja langsung sebesar **Rp. 264.206.388.350,-** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.306.110.512,-**.

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku serta aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan terkait strategi pemecahan masalah tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kualitas Demokrasi	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2021		2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja
1 Persentase kualitas demokrasi	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Perubahan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase kualitas demokrasi	100%	100%

Target persentase kualitas demokrasi adalah 100%, realisasi yang dicapai adalah 100% dan capaian kinerja adalah 100%. Realisasi 100% berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2024.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah :

- Terwujudnya Database Partai Politik dan Data Hibah Keuangan kepada Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Terwujudnya pemahaman dalam pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula kepada siswa-siswi yang telah memiliki hak pilihnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Terwujudnya Database Pemantauan pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp.254.156.056.196, didalamnya terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.733.778.450, Belanja Hibah untuk KPU sebesar Rp.148.575.843.200, Belanja Hibah untuk Bawaslu sebesar Rp.77.304.082.000, Belanja Hibah untuk Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar Rp.26.259.834.000.
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp.239.277.700, dimana telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi bagi pemilih pemula di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp.795.999.600, dimana telah dilaksanakan Kegiatan Pemantauan Pemilu dan Pilkada di 10 Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya .

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran

Meningkatnya Presentasi Kualitas Demokrasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	255.191.333.496	254.843.375.260	99,9

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	254.156.056.196	253.918.274.420	99,9
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	239.277.700	214.246.740	89,5
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	795.999.600	710.854.100	89,3
TOTAL	255.191.333.496	254.843.375.260	99,9

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah mencapai kinerja 99,9%, Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah mencapai kinerja 89,5%, dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah mencapai kinerja 89,3% sehingga capaian kinerja memuaskan ditandai dengan input sebesar 100% dan output rata-rata 99,9%.

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 99,9% dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 1 (satu) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 347.958.236,- atau 0,1% Dari total anggaran penunjang sasaran 1 (satu) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani Sasaran Strategi 1 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 5 (lima) orang sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang : 1 orang
- 2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
- 3. Analis Politik Dalam Negeri : 1 orang
- 4. Pengadministrasi Umum : 1 orang



Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase konflik yang tertangani	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2021		2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	
1	Persentase konflik yang tertangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase konflik yang tertangani	100%	100%

Target persentase konflik yang tertangani adalah 100%, realisasi yang dicapai adalah 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target 100% berdasarkan pada data persentasi tindak kriminalitas yang tertangani pada tahun sebelumnya, dimana terlihat adanya kasus pada tahun 2023 terjadi 19 kasus dan tahun 2024 terjadi 8 kasus sehingga target ditetapkan sesuai dengan situasi kondisi kantrantibmas yang terjadi dikalangan masyarakat. Kondisi daerah Maluku aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang mempengaruhi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya peran dan kerjasama pemerintah serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas. Sehingga realisasi 100% yang diperoleh pada tahun 2024 didapat dari laporan kriminalitas yang tertangani selama tahun berjalan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas :

- Meningkatnya jumlah kasus tindak kriminalitas yang tertangani pada tahun berjalan sehingga mempengaruhi capaian indikator.
- Adanya deteksi dini dan cegah dini.
- Adanya kolaborasi yang solid dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat untuk mengantisipasi masalah-masalah kantrantibmas.
- Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.178.356.000,- didalamnya telah dilaksanakan Kegiatan Pemantauan Situasi Keamanan menjelang Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan tujuan membangun koordinasi dan sinergitas antar Pimpinan Daerah dalam upaya pemantapan Kamtibmas di Maluku dengan jumlah anggaran sebesar Rp.67.200.000.-

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Toleransi Beragama dan Penghargaan Masyarakat terhadap
Pluralitas**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	245.556.000	244.314.616	99,49

Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	178.356.000	177.114.616	99,3
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	67.200.000	67.200.000	100
TOTAL	245.566.000	244.314.616	99,49

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 99,49% dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 (dua) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.251.384,- atau 0,51% dari total anggaran penunjang sasaran 2 (dua) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 2 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
3. Analis Keamanan : 1 orang
4. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat : 1 orang
5. Analis Data Intelijen : 1 orang
6. Pengolah Data Keamanan : -

Sasaran 3

MENURUNNYA GANGGUAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN MASYARAKAT

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tindak Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

**Perbandingan Capaian Kinerja antara
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun 2021		2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja
1 Persentase Tindak Kriminalitas yang tertangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan
Target Renstra Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase Tindak Kriminalitas yang tertangani	100%	100%

Target persentase Tindak Kriminalitas yang tertangani adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target 100% berdasarkan pada data tindak kriminalitas yang tertangani.

Berdasarkan laporan situasi keamanan (Lapsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kondisi daerah Maluku aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang menonjol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas. Sehingga realisasi 100% yang diperoleh pada tahun 2024 didapat dari data tertanganinya tindak kriminalitas sehingga tidak adanya hal-hal yang mengganggu kantrantibmas dikalangan masyarakat sehingga stabilitas ketertiban dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga selama tahun berjalan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah semakin meningkatnya peran dan kerjasama pemerintah serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas dan adanya deteksi dini dan cegah dini. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.562.243.000.- dimana telah dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kantrantibmas di Kabupaten Maluku Tengah, Kegiatan Deteksi Dini di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru.

Kegiatan tersebut diatas mencapai kinerja memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 94%.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Toleransi Beragama dan Penghargaan Masyarakat terhadap
Pluralitas**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	562.243.000	528.238.220	94,0
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	562.243.000	528.238.220	94,0
	T O T A L	562.243.000	528.238.220	94,0

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 94,0% dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 3 (tiga) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. Rp. 34.004.780,- atau 6,0% dari total anggaran penunjang sasaran 3 (tiga) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 3 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
3. Analis Keamanan : 1 orang
4. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat : 1 orang
5. Analis Data Intelijen : 1 orang
6. Pengolah Data Keamanan : -

Sasaran 4**MENINGKATNYA PEMAHAMAN AKAN PENTINGNYA
MEMPERKUAT RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR****Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2024**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

**Perbandingan Capaian Kinerja antara
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun 2021		2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan
Target Renstra Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	100%	100%	100%

Target persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air dan meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama adalah 100%, realisasi yang dicapai 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Berkembangnya paham radikalisme dan degradasi paham ideologi kebangsaan pada tahun berjalan sehingga dipandang perlu untuk diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, pemuda dan pelajar akan pentingnya rasa cinta tanah air dan nilai-nilai toleransi kerukunan antar umat beragama. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menumbuhkan rasa cinta air melalui Sosialisasi Bela Negara, Gerakan Revolusi Mental, Sosialisasi Pembentukan dan Revitalisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Bela Negara adalah Sikap dan Perilaku warga negara dijiwai kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 sebagaimana warga negara Indonesia harus siap untuk melakukan bela negara, salah satunya dengan memelihara persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air, menguatkan kesadaran bela negara, memupuk rasa cinta pada budaya Indonesia. Kegiatan Sosialisasi Bela Negara yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan Kesadaran Bela Negara di kalangan masyarakat.

Forum Pembauran Kebangsaan sebagai wadah untuk berdiskusi, berkomunikasi, bertukar informasi dan bekerja sama di antara warga masyarakat bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, memantapkan dan menumbuhkan pembauran kebangsaan serta dapat menjadi forum pemersatu setiap etnis yang ada di lingkungan masyarakat.

Realisasi 100% pada tahun 2024 diperoleh dari tidak ada kejadian ataupun hal-hal yang mengganggu kehidupan beragama masyarakat di daerah Maluku sehingga rasa nasionalisme dan toleransi antar umat beragama tetap terjaga dan terus ditingkatkan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air dan meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama di Provinsi Maluku sesuai tabel diatas capaiannya 100%, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada kejadian ataupun masalah-masalah yang menonjol yang dapat mengganggu rasa toleransi kehidupan antar umat beragama di Provinsi Maluku.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 dan 2024 telah mencapai target Renstra. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina diantara umat beragama dalam bingkai NKRI serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam menangkal bahaya paham radikalisme dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam upaya semakin meningkatkan rasa toleransi dan kerukunan umat beragama sehingga capaian indikator kinerja sasaran 4 (empat) tahun

2024 adalah 100%. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah dilakukan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah semakin berperannya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan harmonisasi hidup bermasyarakat di Provinsi Maluku serta semakin meningkatnya kesadaran serta rasa tanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Provinsi Maluku.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang meliputi:
 - Kegiatan Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilaksanakan di 4 (Empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan kabupaten Seram Bagian Timur yang mengikutsertakan 50 Orang dengan tujuan mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong berdasarkan Pancasila.
 - Kegiatan Pembentukan Paskibraka yang dilaksanakan di Kota Ambon yang mengikutsertakan 54 orang dengan tujuan Mengibarkan Bendera Merah Putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang meliputi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru dengan jumlah peserta 30 orang. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah dengan mengikutsertakan 30 orang yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabuapten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan tujuan pembentukan forum-forum strategis mitra pemerintah daerah khususnya di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada Kabupaten/Kota.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing

di daerah yang meliputi kegiatan pendaftaran dan pelaporan ormas, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan forum dialog ormas di Kota Ambon dengan jumlah peserta 75 orang, dengan capaian kinerja terlaksananya dialog antara Pemerintah Daerah dengan Ormas dan peningkatan peran serta Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi pengawasan dan pendaftaran ormas dengan capaian kinerja terlaksananya sinkronisasi program pengawasan Ormas antara Pemerintah Kabuapten dengan Pemerintah Provinsi dan terlaksananya proses pendaftaran Ormas berbasis aplikasi.

- e. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- f. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasiltasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang meliputi Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Ambon dengan capaian kinerja memperkuat kerukunan dan toleransi umat beragama menjelang Pilkada serentak melalui pemahaman tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kegiatan Sosialisasi penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jumlah peserta 50 orang. Kegiatan Sosialisasi P4GN yang dilaksanakan di Kabupaten Buru dengan capaian kinerja membangun ketahanan diri masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Rapat Koordinasi P4GN dengan jumlah peserta 50 orang yang dilaksanakan di Kota Ambon dengan capaian kinerja memonitoring dan mengevaluasi pelaporan Timdu dalam melakukan fasilitasi P4GN di instansi masing-masing. Kegiatan Sosialisasi Keluarga Indonesia Sehat Anti Narkoba (KRISAN) yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru dengan jumlah peserta 50 orang/Kabupaten dengan capaian kinerja meningkatnya ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Pemahaman Akan Pentingnya Memperkuat
Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.423.952.600	4.111.674.910	92,9
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela	4.071.729.200	3.787.953.130	93,0

	negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	252.982.000	250.483.380	99,0
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99.241.400	73.238.400	73,8
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	488.128.000	460.616.640	94,4
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	424.964.000	420.446.640	98,9
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	63.164.000	40.170.000	63,6
3.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	442.888.400	432.879.394	97,7
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	442.888.400	432.879.394	97,7

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
TOTAL	5.354.969.000	5.005.170.944	93,5

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 93,5% maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 349.798.056,- atau 6,5% Dari total anggaran penunjang sasaran 4 (empat) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 4 (empat) tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang : 1 orang
- 2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
- 3. Analis Wawasan Kebangsaan : 1 orang
- 4. Analis Ideologi : 1 orang
- 5. Pengadministrasi Umum : 1 orang

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 4 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas sebanyak 5 (lima) orang sebagai berikut:

- 1. Kepala Bidang : 1 orang
- 2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
- 3. Analis Ketahanan Sosial : 1 orang
- 4. Analis Organisasi Masyarakat : 1 orang



Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

**Perbandingan Capaian Kinerja antara
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun 2021		2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja
1 Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan
Target Renstra Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1 Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100%	100%	100%

Target meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas adalah 4 orang, realisasi yang dicapai 4 orang sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target 4 orang pada indikator kinerja meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas disesuaikan dengan kuantitas pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis ASN yaitu 4 orang untuk kegiatan bimbingan Teknis Kegiatan sosialisasi penyusunan SKP 2023 dan Sosialisasi UU No.20 Tahun 2023. Target meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah 1 kegiatan, realisasi yang dicapai 1 kegiatan sehingga capaian kinerja adalah 100%. Hal ini berdasarkan pada kegiatan konsolidasi dan pembinaan Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Maluku yang dilaksanakan untuk membangun koordinasi, sinergi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Maluku. Pada tahun 2024 program dan kegiatan rutin yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kerjasama yang baik serta sinergitas yang terbangun antar bidang bersama unsur/*stakeholder* terkait lainnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 untuk persentase kegiatan yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini dikarenakan kerjasama yang baik serta terbangunnya sinergitas bersama unsur/*stakeholders* terkait. Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target Renstra 2024. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Maluku perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah dilakukan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran serta aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui keikutsertaan Pegawai dalam mengikuti Sosialisasi atau Bimtek di kota Ambon dan luar daerah, tersedianya pelayanan administrasi kantor serta tersediannya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan operasional kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
- e. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku melalui mengikutsertakan pegawai dalam rangka mengikuti sosialisasi atau Bimtek di Kota Ambon dan di luar daerah, hal ini sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan diklat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target.
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan melalui penyediaan 4 (empat) unit printer, 6 (enam) unit Komputer, 2 (dua) unit dispenser. Indikatornya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan bagi pelayanan kantor.
- h. Penyediaan Bahan Logistik kantor yang dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan beberapa jenis Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutinitas kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
- i. Penyediaan barang cetak dan penggandaan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencetakan sampul surat dan foto copy bahan bahan rutinitas kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Indikatornya adalah terpenuhinya sampul surat yang dicetak dan bahan-bahan rutinitas kantor lainnya yang diperbanyak/dicopy.
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana informasi berupa surat kabar dan buku peraturan perundang undangan, indikatornya adalah untuk mengetahui perkembangan informasi serta regulasi yang ada.
- k. Fasilitasi kunjungan tamu yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat kedinasan serta pelayanan bagi tamu, indikatornya adalah terlayannya makan dan minum bagi tamu serta rapat rapat kedinasan.

- l. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi maupun konsultasi ke pusat, indikatornya adalah terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan koordinasi dan konsolidasi dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon . Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mensinergikan program dan kegiatan dibidang kesatuan Bangsa dan Politik secara terarah dan terintegrasi.
- m. Penyediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan berupa penyediaan meterai dan perangko serta benda pos lainnya, indikatornya adalah tertanganinya pertanggungjawaban keuangan dan pengiriman jasa surat menyurat.
- n. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan berupa penyediaan dana untuk pembayaran tagihan telepon/internet (*wifi*) yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, indikatornya adalah terpenuhinya pembayaran internet (*wifi*) selama 1 (satu) tahun.
- o. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan alat-alat kebersihan kantor, indikatornya adalah terpenuhinya ruangan kantor yang bersih nyaman dan terawat.
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa service bagi kendaraan roda empat 3 (tiga) unit selama satu tahun. Indikatornya adalah terawatnya sarana operasional bagi pelayanan kantor.
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya dilaksanakan berupa belanja perawatan perlengkapan kantor terhadap 15 (lima belas) unit laptop, 15 (lima belas) unit printer dan 7 (tujuh) unit AC . Indikatornya adalah terawatnya sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan tersebut diatas menghasilkan kinerja yang memuaskan, dengan capaian input sebesar 100% dan output sebesar 91,4%.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 5 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebanyak 33 orang secara keseluruhan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Kepala Badan | 1 orang |
| 2. Sekretaris Badan | 1 orang |

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik : 6 orang
4. Bidang Politik Dalam Negeri : 7 orang
5. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa : 4 orang
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas : 8 orang
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian : 1 orang
7. Perencana Ahli Muda : 1 orang
8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
9. Bendahara : 1 orang
10. Pengadministrasi Umum : 1 orang
11. Analis Kinerja : 1 orang

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terlaksananya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.710.700	79.627.150	99,9
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	29.915.000	29.863.850	99,8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.795.700	49.763.300	99,9
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.476.110.612	3.965.743.652	88,6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.306.110.512	3.796.645.702	88,2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	170.000.100	169.097.950	99,5
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262.445.800	251.995.000	96,0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.500.000	110.825.000	98,5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.945.800	141.170.000	94,1
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.900.700	352.956.960	90,1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	146.000.000	144.253.000	98,8
Penyediaan Bahan Logistik kantor	94.978.050	86.205.500	90,8
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	90.000.000	78.050.000	86,7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	5.670.000	98,4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.350.000	94.152.800	93,8
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Konsultasi SKPD	1.180.579.100	1.158.700.959	98,1
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.195.104	504.526.267	98,1
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.200.000	1.200.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air Listrik	72.000.000	62.331.163	86,6
Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	440.995.104	440.995.104	100
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	208.268.000	171.434.894	82,3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.698.000	145.884.894	79,9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	25.570.000	25.550.000	99,9
TOTAL	7.158.397.366	6.540.359.222	91,4

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 91.4% maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 618.038.144,- atau 8,6% Dari total anggaran penunjang sasaran 5 (lima) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku

Sasaran 6

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	-	-
Rata-rata Capaian				

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2021		2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja	Realisasi Kinerja	Cap. Kinerja
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	CC	CC	-	-	-	-

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	-	-

Pada Tahun 2022 Indikator meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, mendapatkan Tingkat akuntabilitas kinerja yaitu CC dengan nilai Hasil Evaluasi 58,80. Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi Tahun 2022 lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah. Hasil evaluasi tahun 2022 cukup baik namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada komponen pengukuran kinerja.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 belum mencapai target/belum menyertakan nilai Renstra 2024 dikarenakan tidak melakukan evaluasi mandiri. Namun demikian dengan memperhatikan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta beberapa catatan terkait rekomendasi dalam

rangka mengefektifkan penerapan kinerja agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku lebih efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut diatas menghasilkan kinerja yang memuaskan, dengan capaian input sebesar 100% dan output sebesar 99.4%.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 6 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebanyak 2 orang secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Perencana Ahli Muda : 1 orang
2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan : 1 orang

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terlaksananya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	29.915.000	29.863.850	99,8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.795.700	49.763.300	99,9
	TOTAL	79.710.700	79.627.150	99,9

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 99.9% maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 83.550 atau 0.1 % Dari total anggaran penunjang sasaran 6 (Enam) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku

B. REALISASI ANGGARAN

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada tahun 2024, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku memperoleh dana sebesar **Rp. 253.396.681.633,-** dengan perincian, dana **belanja langsung** sebesar **Rp. 248.861.820.003,-** dan **belanja tidak langsung** sebesar **Rp. 4.534.861.630,-** dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 268.512.498.862,-** dengan perincian dana belanja langsung **Rp. 264.206.388.350,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 4.306.110.512,- Pengalokasian Anggaran berdasarkan program yang diadaptasi sesuai Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, sebagai berikut :

**JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU
BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2024**

No	PROGRAM	Jumlah	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.852.286.854	1,06
2.	Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.423.952.600	1,65
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	255.191.333.496	95,03
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	488.128.000	0,18
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	442.888.400	0,16
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	807.799.000	0,30
	T O T A L	268.512.498.862	100

II. Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Program

Adapun rincian pagu dana untuk Belanja Langsung per kegiatan / program APBD Tahun 2023 serta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PROGRAM	Jumlah	REALISASI	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.852.286.854	2.743.713.520	96,2
2.	Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.423.952.600	4.111.674.910	92,9

3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	255.191.333.496	254.843.375.260	99,9
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	488.128.000	460.616.640	94,4
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	442.888.400	432.879.394	97,7
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	807.799.000	772.552.836	95,6
	T O T A L	268.512.498.862	263.364.812.560	98,1

Berdasarkan tabel tersebut diatas pagu dana yang disediakan untuk membiayai belanja langsung sebesar **Rp. 268.512.498.862,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 263.364.812.560,-** atau sebesar **98,1%**.

Secara rinci dapat terlihat pada uraian realisasi penggunaan dana sesuai program/kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,8%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 88,2%
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,5%
- e. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,5%
- f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 94,1%
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,8%

- h. Penyediaan Bahan Logistik kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 90,8%
- i. Penyediaan barang cetak dan penggandaan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 86,7%
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,4%.
- k. Fasilitasi kunjungan tamu terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 93,8%
- l. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,1%
- m. Penyediaan jasa surat menyurat terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- n. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 86,6%.
- o. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 79,9%
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.

2. Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 93%.
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 99%.
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 73,8%.

3. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

- dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 99,9%.
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 89,5%
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 89,3%.

4. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,9%.
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 63,6%.

5. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 97,7%

6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 94%
- b. Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99%.

- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%.

III. Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tidak langsung dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 4.306.110.512,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 3.796.645.702,-** atau sebesar **88,2%**.

Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun 2024 mencapai hasil yang memuaskan, dan diharapkan pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku ini dapat dilaksanakan sesuai program untuk mencapai Visi dan Misi yang diharapkan demi terwujudnya masyarakat Maluku yang kondusif sesuai Visi Pemerintah Daerah Maluku.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya dalam satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 6 (enam) program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menggambarkan pencapaian presentasi yang sangat memuaskan yaitu **99,5%**.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi pegawai dalam pelaksanaan tugas karena beban tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam menciptakan dan memfasilitasi terciptanya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat yang selanjutnya akan berdampak pada keamanan dan ketahanan lokal serta ketahanan bangsa.

Untuk itu dalam mengatasi sejumlah persoalan diatas, guna mengantisipasi permasalahan yang sama maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mengambil langkah-langkah yaitu mengevaluasi secara mendalam program yang belum maksimal pencapaiannya untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta perencanaan yang lebih realistis dalam menentukan target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan yang ada agar hasil yang dicapai optimal, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ambon, Februari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**



DANIEL EDUARD INDEY S.Sos.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19681210 198902 1 002

**JUMLAH PEGAWAI YANG DIRINCI
MENURUT GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN
PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024**

GOL / RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
	PRIA	WANITA		
II/a	-	-	-	
II/b	-	-	-	
II/c	1	-	1	
II/d	-	-	-	
Jumlah	1	-	1	
III/a	1	-	1	
III/b	5	4	9	
III/c	3	1	4	
III/d	4	5	10	
Jumlah	12	10	23	
IV/a	4	1	5	
IV/b	3	-	3	
IV/c	1	-	1	
IV/d	-	-	-	
Jumlah	8	1	9	
Total Seluruh	21	12	33	

**JUMLAH PEGAWAI YANG DIRINCI
MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024**

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			PRIA	WANITA	
1.	S D	-	-	-	
2.	SLTP	-	-	-	
3.	SLTA	5	3	2	
4.	SARJANA MUDA	-	-	-	
5.	S1	19	11	9	
6.	S2	8	7	1	
7.	S3	-	-	-	
Jumlah Seluruh		33	21	12	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2024**

Sasaran		Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 29.915.000	Rp. 29.863.850	99,8%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 49.795.700	Rp. 49.763.300	99,9%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 170.000.100	Rp. 169.097.950	99,5%	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Rp. 120.500.000	Rp. 110.825.000	98,5%	
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 149.945.800	Rp. 141.170.000	94,1%	
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 146.000.000	Rp. 144.253.000	98,8%	
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp. 94.978.050	Rp. 86.206.500	90,8%	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 90.000.000	Rp. 78.050.000	86,7%	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 5.760.000	Rp. 5.670.000	98,4%	

10	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 100.350.000	Rp. 94.152.800	93.8%	
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.180.579.100	Rp. 1.158.700.959	98.1%	
12	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	100%	
13	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 72.000.000	Rp. 62.331.163	100%	
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 440.995.104	Rp. 440.995.104	92.3%	
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 182.698.000	Rp. 145.884.894	79.9%	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi saran dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 25.570.000	Rp. 25.550.000	99,9%	

17	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 4.071.729.200	Rp. 3.886.303.130	95.4%	
18	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 252.982.000	Rp. 250.483.380	99.0%	
19	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 99.241.400	Rp. 73.238.400	73.8 %	
20	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	Rp. 254.156.056.196	Rp. 253.918.274.420	99.9%	

	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
21	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 239.277.700	Rp. 214.246.740	89.5%	
22	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 795.999.600	Rp. 710.854.100	89.3%	
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 424.964.000	Rp. 420.446.640	98.9%	
24	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 63.164.000	Rp. 40.170.000	63.6%	
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Rp. 442.888.400	Rp. 432.879.394	97.7%	

	Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 562.243.000	Rp. 528.238.220	94%	
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 178.356.000	Rp. 177.114.616	99%	
28	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rp. 67.200.000	Rp. 67.200.000	95.6%	

**POHON KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Partai Politik

Meningkatkan Presentasi Pencegahan dan Penanganan Konflik

Meningkatkan Kapasitas, Sumber daya aparatur

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Demokrasi Provinsi Maluku

Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Meningkatnya Presentase Kualitas Demokrasi

Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas

Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN

Presentase Kualitas Demokrasi

Presentase Konflik yang tertangani

Presentase Tindak Kriminalitas yang tertangani

Presentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air

Presentase Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama

Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Raya Pattimura No. 1 Ambon 97125
Pos-el : kesbangpolpromal@malukuprov.go.id

I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Maluku dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan data Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Maluku dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Maluku. Data kinerja yang dikumpulkan meliputi data target dan realisasi dari :

1. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku 2019 -2024 pada Cascading renstra)
2. Indikator kinerja program dan kegiatan (sebagai Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku 2019 -2024 pada Cascading renstra)

III. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008.
- e. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
- f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.














IV. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

- a. Penanggung Jawab : Kepala Badan
- b. Unit Pengelola Data : Sekretaris Badan
- c. Unit Penyusun Laporan : Perencana Ahli Muda
- d. Unit Penyuplai Data : Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Kabid. Politik Dalam Negeri.

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

SOP PENGUMPULAN DATA UNTUK PENGUKURAN KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kaban	Sekban	Kabid	Bag. Perencana	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memerintahkan Penyusunan LKIP							
2.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang							
3.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang							
4.	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang terkumpul					TOR dan NPD yang disetujui	1 Hari	SPP, SPM dan SP2D
5.	Membuat draft LKIP					SP2D	2 hari	Kwitansi pembayaran
6.	Mengoreksi draft LKIP					Kwitansi dan bukti-bukti SPJ	2 Hari	SPJ terverifikasi
7.	Rapat Finalisasi LKIP					SPJ terverifikasi	2 Hari	SPJ ditanda tangan
8.	Menyampaikan dokumen LKIP dari Sekban ke Kaban untuk mendapatkan persetujuan							
9.	Penandatanganan dokumen LKIP oleh Kaban							
10.	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran							
11.	Penggandaan dokumen LKIP							
12.	Pengiriman dokumen LKIP							

VI. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Maluku sebagai suatu prosedur operasional standar. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Ambon, Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Maluku



Daniel Eduard Indey, S.Sos, M.Si
NIP. 19681210 198902 1 003

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2024**

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi		
1	3		5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Rp 29.915.000	Rp 29.863.850	100
		2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Rp 49.795.700	Rp 49.763.300	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	Rp 170.000.100	Rp 169.097.950	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	Rp 112.500.000	Rp 110.825.000	98,5
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Rp 149.945.800	Rp 141.170.000	94,1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Rp 146.000.000	Rp 144.253.000	99
		2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Rp 94.978.050	Rp 86.205.500	90,8
		3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Rp 90.000.000	Rp 78.050.000	87

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
		4.	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	Rp 5.760.000	Rp 5.670.000	98	
		5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuu	laporan	Rp 100.350.000	Rp 94.152.800	93,8	
		6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Rp 1.180.579.100	Rp 1.158.700.959	98,1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	100	
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Rp 72.000.000	Rp 62.331.163	86,6	
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Rp 440.995.104	Rp 440.995.104	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Rp 182.698.000	Rp 145.884.894	79,9	
		2.	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket	Rp 25.570.000	Rp 25.550.000	99,9	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	Rp 4.071.729.200	Rp 3.886.303.130	95,4	
		2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	Rp 252.982.000	Rp 250.483.380	99,0	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
		3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	Rp 99.241.400	Rp 73.238.400	73,8	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	kegiatan dan laporan	Rp 254.156.056.196	Rp 253.918.274.420	99,9	
		2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	Rp 239.277.700	Rp 214.246.740	89,5	
		3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	Rp 795.999.600	Rp 710.854.100	89,3	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	Rp 424.964.000	Rp 420.446.640	98,9	
		2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	Rp 63.164.000	Rp 40.170.000	63,6	
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	Rp 442.888.400	Rp 432.879.394	97,7	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	Rp 562.243.000	Rp 528.238.220	94,0	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
		2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	Rp 178.356.000	Rp 177.114.616	99,3	
		3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	dokumen	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	100,0	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Eduard Indey, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

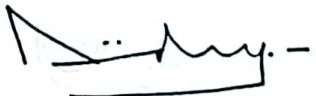
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2024 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2024

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,

Daniel Eduard Indey, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196812101989021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Persentase Kualitas Demokrasi	Persentase Kualitas Demokrasi	100%
2	Meningkatnya Toleransi Beragama dan Penghargaan Masyarakat Terhadap Pluralitas	Persentase Konflik yang Tertangani	100%
3	Menurunnya Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminalitas yang tertangani	100%
4	Meringkatnya Pemahaman akan Pentingnya Memperkuat Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	Persentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Tanah Air	100%
		Persentase Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat Beragama	100%
5	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 2.912.286.854	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rp 552.223.400	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 244.543.494.349	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 228.128.000	APBD

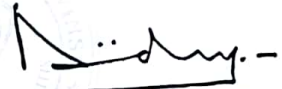
No	Program	Anggaran	Keterangan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 267.888.400	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 357.799.000	APBD

Ambon, Maret 2024

Gubernur Maluku,

Murad Ismail

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Maluku,


Daniel Eduard Indey, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196812101989021002